



PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN

Dewi Kusuma Wardani *
Ika Andriyani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
*email: dewifeust@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to examine the effect implementation of the influence of human resource quality, exploiting of information technology, and internal control system for reliability of the Government Financial Reporting Countability village in Klaten district. This research is causative research. The population in this study is the village in Klaten district government, especially government Manisrenggo village in the district and every village government was represented by seven people that the village head and village as respondents. Data collection is done directly by using a questionnaire. While the tools of analysis used was multiple regression with SPSS program version 16.0. The results show that the variable human resource quality and internal control system have influence to reliability of financial reporting in the Klaten district of the village administration, while exploiting of information technology has no influence to reliability of financial reporting in the Klaten district of the village administration

INFO ARTIKEL

Diterima: 3 Agustus 2017
Direview: 4 Agustus 2017
Disetujui: 31 Oktober 2017
Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

Reliability of Financial Reporting, Human Resource Quality, Exploiting of Information Technology, and Internal Control System

PENDAHULUAN

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (www.bpkp.go.id). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 mendapat kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Alokasi dana sebesar itu baru pertama kali dalam sejarah APBN Republik Indonesia. Penggunaan dana tersebut harus dikelola secara akuntabel di tengah minimnya akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya desa-desa yang berada di Kabupaten Klaten (www.ugm.ac.id).

Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat desa. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan desa untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan nilai informasi salah satunya yaitu keandalan. Ariesta (2013) menyatakan Keandalan adalah suatu kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam pelaporan keuangan pemerintahan desa mampu memberikan informasi yang andal/valid dan bebas dari pengertian yang menyesatkan, sehingga masyarakat desa percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar.

Mengutip dari Karmila (2012) keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten dipengaruhi berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, dan sistem pengendalian intern yang dapat diandalkan. Hal pertama yang mungkin mempengaruhi adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dilihat dari kualitas sumber daya manusia desa yang kurang tanpa adanya kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankan tugasnya membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (www.ugm.ac.id). Hal ini menyebabkan Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Maka diperlukan adanya pengoptimisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan desa khususnya desa-desa di Kabupaten Klaten berkaitan dengan teknologi informasi masih sangat kurang. Banyak yang belum paham komputer bahkan ada yang sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung keterandalan pelaporan keuangan desa (www.solopos.com).

Sistem pengendalian intern merupakan hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektsian penggelapan (fraud), sehingga laporan keuangan memberikan keyakinan keandalan.

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan oleh Karmila dkk, (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa hanya pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan

Afrianti (2011) menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga

sumber daya manusia (SDM) tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi,

Lebih lanjut Ariesta (2013) menyatakan apabila sumber daya manusia pelaku sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan maka kualitas informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi akan memiliki kualitas yang rendah. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa

Menurut Ariesta (2013) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Lebih lanjut Pramudiarta (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Sistem Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa

Menurut PP 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendekripsi penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Jika SPI tinggi maka proses akuntansi dapat diarahkan, diawasi, dan dapat dideteksi adanya penggelapan sehingga laporan keuangan mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan yang andal. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sistem Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa pada desa-desa di Kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Manisrenggo. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode *Purposive sampling*.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan-operasionalkan variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. *Pilot test* dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengertian tentang Sumber Daya Manusia sesuai dengan Afrianti (2011) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Tabel 1
Pengembangan Instrumen Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Kemampuan individu	1. Pemerintah desa anda memiliki staf yang mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai standar akuntansi. 2. Staf pemerintah desa anda belum mampu menyusun laporan keuangan desa.
2. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan	3. Pemerintah desa anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas. 4. Peran dan tanggungjawab seluruh staf pemerintah desa anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan desa.
3. Memahami prosedur dan proses akuntansi	5. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi. 6. Uraian tugas staf pemerintah desa anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. 7. Pemerintah desa anda telah melakukan proses akuntansi.
4. Pelatihan yang teratur	8. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber peralatan, pelatihan yang dibutuhkan. 9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Zuliarti (2012) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Indikator pemanfaatan teknologi informasi diambil dari penelitian Pramudiarta (2015) dan Nihayah (2015).

Tabel 2
Pengembangan Instrumen Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Proses kerja secara elektronik	1. Pemerintah desa anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
2. Pengolalaan penyimpanan keuangan	2. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet	3. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja desa.
4. Sistem manajemen	4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
5. Perawatan pemeliharaan perangkat komputer	5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 6. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. 7. Sistem keamanan komputer (antivirus) diperbarui secara teratur.

3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketiaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 tahun 2008). Adapun indikatornya adalah perancangan yang memadai, pemisahan wewenang, dan tindakan disiplin atas pelanggaran mengambil referensi dari Pramudiarta (2015) dan Nihayah (2015).

Tabel 3
Pengembangan Instrumen Sistem Pengendalian Internal

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Perancangan yang memadai	1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> . 2. Pembuatan serta penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
2. Pemisahan wewenang	3. Adanya pemisahan wewenang secara tepat dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 4. Dalam melakukan transaksi belum adanya pemisahan wewenang secara tepat
3. Tindakan disiplin atas pelanggaran	5. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

4. Keandalan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (PP No. 24 Tahun 2005)

Tabel 4
Pengembangan Instrumen Keandalan

Pernyataan	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Penyajian jujur	1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
2. Realisasi	2. Penyajian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 3. Laporan keuangan disampaikan secara sistematis dan teratur.
3. Rekonsiliasi	4. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
4. Informasi dapat diuji	5. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.
5. Netralisasi	6. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
6. Pengarahan Informasi	7. Informasi yang dibutuhkan belum tersedia ketika diminta.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Namun, sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu melakukan uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, peneliti melakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikolinieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Menurut Ghazali (2011), untuk memastikan bahwa data berkualitas, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari uji validitas dihasilkan r hitung $> r$ tabel yaitu diatas 0,223. Dari uji reliabilitas diperoleh hasil *Cronbach-Alpha* dengan nilai $>0,70$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua variabel valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov test* diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,593 lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa data berdisribusi normal. Dari hasil uji heteroskedasitas diperoleh nilai signifikan 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Demikian pula dengan uji multikolininearitas, dimana nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Model/*Goodness of Fit* (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di bawah ini diperoleh nilai F sebesar 16,673 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, berarti salah satu dari ketiga variabel independen tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Tabel 5
Hasil Uji Model/*Goodness of Fit* (Uji F)
ANOVA^b

Model		Sum Squares	of Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	246.892	3	82.297	16,673	.000 ^a
	Residual	365.262	74	4.936		
	Total	612.154	77			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Berdasarkan tabel 3 dapat jabarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 11,316 + 0,237X_1 + 0,008X_2 + 0,449X_3 + \varepsilon$$

Tabel 2
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	11.316	2.566				4.409	.000
X ₁ : Kualitas Sumber Daya Manusia	.237	.096	.324			2.462	.016
X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi	.008	.062	.013			.127	.899
X ₃ : Sistem Pengendalian Intern	.449	.169	.354			2.661	.010

Sumber : Data primer diolah 2016

Hipotesis 1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi $0,016 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,462 > t_{tabel} 1,6646$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Hipotesis 2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Dari tabel 2 dapat di lihat nilai signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi $0,899 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,127 < t_{tabel} 1,6646$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Hipotesis 3: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Dari tabel 2 dapat di lihat nilai signifikan variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi $0,1 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 1,6646$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Koefisien Determinasi

Pada output SPSS *model summary* menunjukkan besarnya adjusted R square sebesar 0,379 yang berarti Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa dipengaruhi 37,9 % oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan sisanya, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian, seperti pengawasan keuangan daerah.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.403	.379	2.222

- a. Predictors : (Constat), X3, X2, X1
b. Dependent : Variabel Y

Sumber : Data Primer Diolah 2016

Pada penelitian ini, hipotesis 1 yang diajukan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Dari hasil uji hipotesis 1, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,462 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,6646 dengan tingkat signifikan 0,016. Maka dari hasil tersebut H_1 terdukung dan H_0 ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan teori yang mengatakan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha keuangan pada perangkat desa yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan adalah benar, karena dengan jumlah yang cukup serta memiliki latar pendidikan akuntansi, maka perangkat desa yang bekerja akan dapat menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan tepat dan baik.

Kondisi secara praktik di lapangan berbeda karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi dalam bidang akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap perangkat desa untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberdayaan perangkat desa yang telah ada. Dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang bertema akuntansi dan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mengimbangi kelemahan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Ariesta (2013), dan Sembiring (2013). Hal ini disebabkan kondisi pemerintah desa yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah/desa. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Zuliarti (2012), Husna (2013), dan Arfianti (2011) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada penelitian ini, hipotesis 2 yang diajukan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hasil pengujian hipotesis 2 adalah nilai t hitung sebesar 0,127 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,6646 dengan tingkat signifikan 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain, H_2 ditolak dan H_0 terdukung.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan TI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan Zuliarti (2012), Nihayah (2015), Ariesta (2013), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Sembiring (2013) yang menyimpulkan bahwa Pemanfaatan TI berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ke-tidaksignifikan-an ini mungkin disebabkan teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya banyak, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia, mahal namun tidak dapat mendukung kehandalan penyajian laporan keuangan.

Pada penelitian ini, hipotesis 3 yang diajukan adalah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hasil pengujian hipotesis 3 adalah nilai t hitung sebesar 2,661 serta tingkat signifikansi sebesar 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain, H_3 terdukung dan H_0 ditolak. Hasil tersebut memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh perangkat desa, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Arfianti (2011), Wansyah, dkk (2012), Husna (2013), dan Sembiring (2013) yang menghasilkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Karmila, dkk (2012) yang menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Saran yang diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah :

a. Untuk Pemerintahan Desa Kabupaten Klaten

Bagi pemerintah desa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal selain itu, pemerintah desa hendaknya memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasiannya dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

b. Untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi dengan metode lain, misalnya dengan wawancara, agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel dependen penelitian, seperti dapat dibandingkan dan dapat dipahami atau dengan menambah variabel independen yang lain agar dapat menambah variasi dalam penelitian selanjutnya, contoh variabel lain yaitu pengawasan keuangan daerah.

REFERENSI

- Anonim. (5 Maret 2016). "Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Simda Desa) Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah (Nawa Cita): Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan". <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- Anonim. (5 Maret 2016). "Kelola Dana Rp 20 T, Seluruh Desa Perlu 'Akuntan Ndeso'". <http://ugm.ac.id/id/berita/10229-kelola.dana.rp.20.t.seluruh.desa.perlu.%E2%80%98akuntan.ndeso%E2%80%99>
- Anonim. (5 Maret 2016). "Pengelolaan Dana Desa BPKP Sosialisasikan Aplikasi Laporan Keuangan Desa Berbasis TI". <http://www.solopos.com/2016/03/01/pengelolaan-dana-desa-bpkp-sosialisasikan-aplikasi-laporan-keuangan-desa-berbasis-ti-696621>
- Arfianti, Dita. (2011). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ariesta, Fadila. (2013). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)". E-Jurnal, Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto. (2015). "Pengaruh Standar Pelaporan Keuangan dan Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Untuk Mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Skripsi, Universitas Mercu Buana.
- Husna, Fadhilla. (2013). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)". E-Jurnal, Universitas Negeri Padang.

- Karmila, dkk. (2012). “*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)*”. E-Jurnal, Universitas Riau.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pramudiarta, Rizal. (2015). “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai Skpd di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)*”. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sembiring, Febriday Leonard. (2013). “*Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)*”. E-Jurnal, Universitas Negeri Padang.
- Wansyah, Hendra, dkk. (2012). “*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh*”. E-Jurnal, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. (2010). “*Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*”. E-Jurnal, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Zuliarti. (2012). “*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*”. Skripsi, Universitas Muria Kudus.